



### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sibolga dalam kurun waktu 2016 –2020 mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Saat penyusunan dokumen ini, PMDN Nomor 13 Tahun 2006 telah dicabut.



Peraturan –peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yang tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga telah berdasar kepada peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan tersebut di atas.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang –kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan



daerah. Analisis kinerja keuangan Kota Sibolga periode tahun 2016 – 2021 didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sibolga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016–2020.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Sibolga secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya pandemi Covid-19.

Adapun gambaran keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun masa lalu dari tahun 2016 –2020 dalam pelaksanaan RPJ MD Tahun 2016 – 2021 dan proyeksi kedepan tahun 2021 –2026 sebagai berikut:

### **3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020**

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

##### **3.1.1.1 Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan



kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, secara umum pendapatan daerah Kota Sibolga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,24% (-0,24%) . Hal ini disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Transfer dari Rp549.915.943.860 Tahun 2016 menjadi Rp525.379.250.738 di Tahun 2020 . Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,42% dari Rp68.537.902.708,01 di Tahun 2016 menjadi Rp79.539.316.412,03 di Tahun 2020 dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah sebesar 42,64% dari Rp5.000.000.000 di Tahun 2016 menjadi Rp12.403.273.154 di Tahun 2020. Selanjutnya penurunan peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut.



**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kota Sibolga Tahun 2016 –2020**

No.	URAIAN	REALISASI (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>623.453.846.568,01</b>	<b>615.864.227.562,69</b>	<b>622.367.464.687,60</b>	<b>610.446.000.905,16</b>	<b>617.321.840.304,03</b>	<b>-0,24%</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>68.537.902.708,01</b>	<b>103.672.203.938,17</b>	<b>81.245.733.811,60</b>	<b>69.312.217.832,16</b>	<b>79.539.316.412,03</b>	<b>7,42%</b>
1	Pajak Daerah	7.571.636.469,03	9.328.677.558,50	11.109.185.906,00	11.512.425.032,00	9.712.781.443,00	7,57%
2	Retribusi Daerah	4.431.652.645,00	5.006.706.990,00	4.950.487.848,00	4.841.363.371,00	4.889.390.783,00	2,66%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.479.669.456,00	13.367.390.081,00	11.828.727.020,00	6.797.264.219,00	12.808.443.670,00	21,73%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	47.054.944.137,98	75.969.429.308,67	53.357.333.037,60	46.161.165.210,16	52.128.700.516,03	7,78%
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>549.915.943.860,00</b>	<b>507.185.381.291,00</b>	<b>526.969.290.876,00</b>	<b>526.877.503.073,00</b>	<b>482.383.902.738,00</b>	<b>-1,04%</b>
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	530.442.349.928,00	490.499.639.818,00	512.639.624.901,00	502.391.227.055,00	464.208.154.008,00	-3,15%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	15.347.489.361,00	13.206.605.218,00	12.455.401.558,00	9.431.330.821,00	13.320.463.851,00	-0,67%
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.713.894.567,00	925.395.120,00	3.694.879.965,00	3.576.516.101,00	3.160.089.487,00	59,61%
3	Dana Alokasi Umum	412.805.887.000,00	405.554.215.000,00	405.554.215.000,00	422.054.364.000,00	391.676.849.000,00	-1,22%
4	Dana Alokasi Khusus	100.575.079.000,00	70.813.424.480,00	90.935.128.378,00	67.329.016.133,00	56.050.751.670,00	-10,97%
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	17.987.537.032,00	16.685.741.473,00	14.329.665.975,00	24.486.276.018,00	18.175.748.730,00	5,94%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.987.537.032,00	16.685.741.473,00	14.329.665.975,00	24.486.276.018,00	18.175.748.730,00	5,94%
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.3	BANTUAN KEUANGAN	1.486.056.900,00	0	0	0	0	0,00%
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	1.486.056.900,00	0	0	0	0	0,00%
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.006.642.333,52</b>	<b>14.152.440.000,00</b>	<b>14.256.280.000,00</b>	<b>55.398.621.154,00</b>	<b>1,18</b>
1	Pendapatan Hibah	0	0	14.152.440.000,00	14.256.280.000,00	12.322.520.000,00	-3,21%
2	Pendapatan Lainnya	0	218.358,52	0	0	80.753.154,00	0,00%
3	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	5.006.423.975,00	0	0	42.995.348.000,00	0,00%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>689.328.238.131,79</b>	<b>597.388.319.451,24</b>	<b>636.257.456.881,61</b>	<b>581.083.861.404,64</b>	<b>568.283.334.370,09</b>	<b>-4,43%</b>
2.1	BELANJA OPERASI	503.617.931.719,18	472.563.944.514,72	493.614.259.884,61	499.075.972.245,64	459.170.613.675,09	-2,15%



No.	URAIAN	REALISASI (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Pegawai	310.746.020.805,00	274.618.882.501,00	282.641.195.732,00	253.124.614.277,00	245.172.603.408,00	-5,57%
2	Belanja Barang	177.753.748.714,18	184.362.865.013,72	194.002.165.787,61	225.375.181.204,64	176.235.683.263,09	0,83%
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00%
4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
5	Belanja Hibah	5.867.000.000,00	4.022.400.000,00	6.307.695.000,00	5.232.540.764,00	20.010.660.004,00	72,69%
6	Belanja Bantuan Sosial	9.251.162.200,00	9.559.797.000,00	10.663.203.365,00	15.343.636.000,00	17.751.667.000,00	18,62%
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.382.143.912,61</b>	<b>124.824.374.936,52</b>	<b>142.467.823.362,00</b>	<b>81.569.259.159,00</b>	<b>86.041.237.376,00</b>	<b>-13,95%</b>
	Belanja Tanah	0	15.000.000,00	2.721.530.593,00	0	213.448.000,00	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	52.138.608.361,61	39.730.333.425,52	50.342.216.965,00	24.886.186.112,00	29.926.767.083,00	-6,85%
	Belanja Gedung dan Bangunan	42.349.237.778,00	42.287.319.370,00	36.672.518.534,00	24.798.751.400,00	33.060.221.123,00	-3,12%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.481.080.623,00	40.498.004.262,00	49.237.453.026,00	28.790.763.550,00	19.555.323.250,00	-26,82%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	413.217.150,00	2.293.717.879,00	3.494.104.244,00	3.093.558.097,00	3.285.477.920,00	125,54%
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>328.162.500,00</b>	<b>0</b>	<b>175.373.635,00</b>	<b>438.630.000,00</b>	<b>23.071.483.319,00</b>	<b>1.302,50%</b>
1	Belanja Tak Terduga	328.162.500,00	0	175.373.635,00	438.630.000,00	23.071.483.319,00	1.302,50%
<b>3</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>349.954.815,00</b>	<b>299.212.620,00</b>	<b>481.519.635,00</b>	<b>180.254.642,00</b>	<b>141.012.566,00</b>	<b>-9,48%</b>
3.1	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	349.954.815,00	299.212.620,00	481.519.635,00	180.254.642,00	141.012.566,00	-9,48%
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	100.000.000,00	0	0	0,00%
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	349.954.815,00	299.212.620,00	381.519.635,00	180.254.642,00	141.012.566,00	-15,38%
<b>4</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>89.016.251.249,96</b>	<b>16.001.759.048,18</b>	<b>28.760.673.122,63</b>	<b>14.806.771.307,05</b>	<b>38.469.824.145,57</b>	<b>27,25%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>89.916.251.249,96</b>	<b>22.791.904.871,18</b>	<b>34.207.054.885,63</b>	<b>14.806.771.307,05</b>	<b>43.842.361.235,57</b>	<b>28,70%</b>
1	Penggunaan SILPA	81.182.196.223,96	22.791.904.871,18	34.207.054.885,63	14.380.700.345,62	3.842.361.235,57	31,27%
2	Penerimaan Piutang Daerah	8.734.055.026,00	0	0	0	0	0,00%
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	426.070.961,43	0	-25,00%
<b>4.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>6.790.145.823,00</b>	<b>5.446.381.763,00</b>	<b>0</b>	<b>5.372.537.090,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	900.000.000,00	6.790.145.823,00	5.446.381.763,00	0	5.372.537.090,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	89.016.251.249,96	16.001.759.048,18	28.760.673.122,63	14.806.771.307,05	38.469.824.145,57	27,25%
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN) BERKENAAN</b>	<b>22.791.904.871,18</b>	<b>34.178.454.539,63</b>	<b>14.389.161.293,62</b>	<b>43.988.656.165,57</b>	<b>87.367.317.513,51</b>	<b>74,09%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).



Tabel 3.2  
Komponen Pendapatan Daerah terhadap  
Total Pendapatan Daerah 2016 -2020

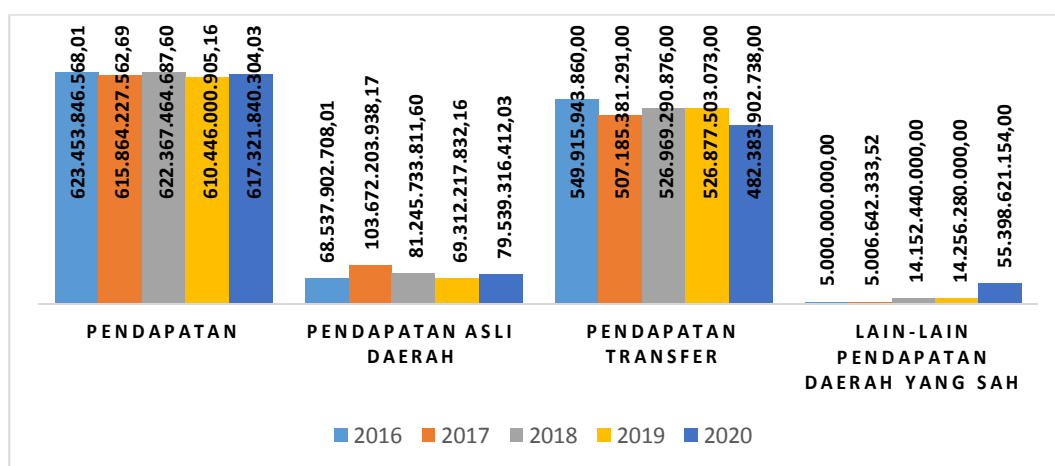
No.	Uraian	2016					2017					2018					2019					2020				
		2016					2017					2018					2019					2020				
1	Pendapatan Asli Daerah	68.537.902.708,01					103.672.203.938,17					81.245.733.811,60					69.312.217.832,16					79.539.316.412,03				
2	Pendapatan Transfer	549.915.943.860,00					507.185.381.291,00					526.969.290.876,00					526.877.503.073,00					525.379.250.738,00				
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00					5.006.642.333,52					14.152.440.000,00					55.398.621.154,00					12.403.273.154,00				
	Pendapatan	623.453.846.568,01					615.864.227.562,69					622.367.464.687,60					610.446.000.905,16					617.321.840.304,03				

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

Tabel 3.3  
Rasio Komponen Pendapatan Daerah terhadap  
Total Pendapatan Daerah 2016 -2020

No.	Uraian	P.APBD				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Asli Daerah	10,99%	16,83%	13,05%	11,35%	12,88%
2	Dana Perimbangan	88,20%	82,35%	84,67%	86,31%	78,14%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,80%	0,81%	2,27%	2,34%	8,97%
	Jumlah Pendapatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

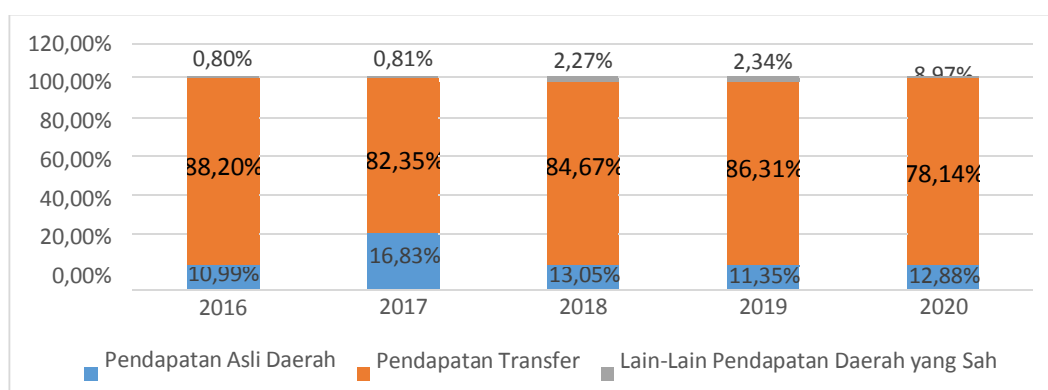
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).



Grafik 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020  
 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah)

Pendapatan daerah Kota Sibolga pada Tahun 2016–2020 didominasi Dana Perimbangan dari Pemerintah. Kontribusi Dana Perimbangan mengalami penurunan dari sebesar Rp549.915.943.860,00 atau 88,20% pada tahun 2016 menjadi Rp482.383.902.738,00 atau 78,14% pada tahun 2020, berkurang sebesar 67.532.041.122,00. Kondisi kontribusi pendapatan daerah tersebut digambarkan pada grafik berikut.



Grafik 3.2

Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020  
 Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah)

Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting, karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan





pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Dengan melihat grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Sibolga tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar. Hal ini juga sesuai dengan penilaian Menteri Keuangan di dalam PMK nomor 120/PMK.07/2020 tentang Kapasitas Fiskal sebesar 0.536 (Kategori Rendah).

Dalam masa Pandemi Covid -19, Tahun 2020 Pemerintah Kota Sibolga melakukan kebijakan untuk mendukung perekonomian dan fiskal Daerah dengan melakukan:

1. Pembebasan pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk periode April sampai dengan Juni tahun 2020 dengan mengeluarkan SK Walikota nomor 970/193/Tahun 2020;
2. Penundaan J atuh Tempo Pembayaran PBB -P2 Tahun 2020 dengan mengeluarkan SK Walikota Nomor 970/324/Tahun 2020.

Kedepannya, dalam mendukung Kapasitas Fiskal, Pemerintah Kota Sibolga perlu mengevaluasi dan meninjau ulang tarif Retribusi Daerah untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan keperluan pendanaan pembangunan daerah.

#### **3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah. Pada periode 2016-2020, tumbuh cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan 7,42%. Pada tahun 2016 PAD Kota Sibolga adalah



Rp68.537.902.708,01 menjadi Rp79.539.316.412,03 pada tahun 2020.

Komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan komponen Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 -2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kota Sibolga Tahun 2016-2020 (Rupiah)

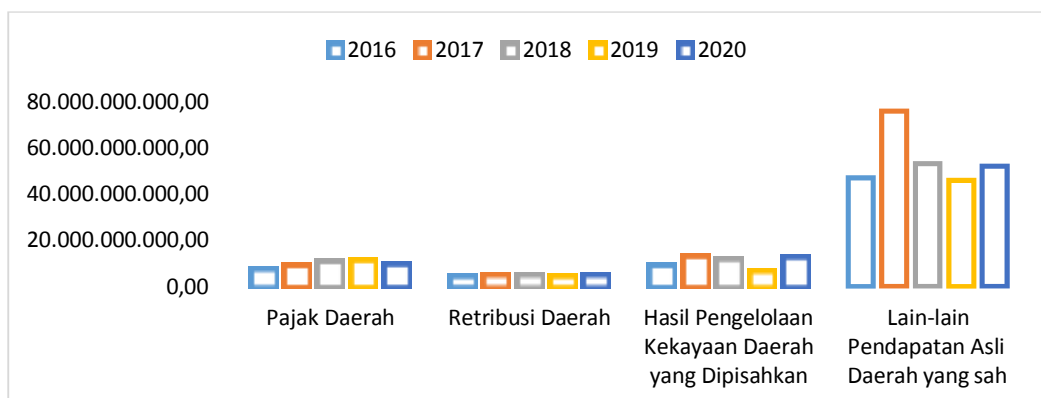
Tahun	Jenis Pendapatan Daerah				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
2016	7.571.636.469,03	4.431.652.645,00	9.479.669.456,00	47.054.944.137,98	68.537.902.708,01
2017	9.328.677.558,50	5.006.706.990,00	13.367.390.081,00	75.969.429.308,67	103.672.203.938,17
2018	11.109.185.906,00	4.950.487.848,00	11.828.727.020,00	53.357.333.037,60	81.245.733.811,60
2019	11.512.425.032,00	4.841.363.371,00	6.797.264.219,00	46.161.165.210,16	69.312.217.832,16
2020	9.712.781.443,00	4.889.390.783,00	12.808.443.670,00	52.128.700.516,03	79.539.316.412,03
Rata-rata Pertumbuhan (%)	7,57%	2,66%	21,73%	7,78%	7,42%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

**Tabel 3.5**  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kota Sibolga Tahun 2016 -2020

Tahun	Jenis Pendapatan Daerah			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2016	11,05%	6,47%	13,83%	68,66%
2017	9,00%	4,83%	12,89%	73,28%
2018	13,67%	6,09%	14,56%	65,67%
2019	16,61%	6,98%	9,81%	66,60%
2020	12,21%	6,15%	16,10%	65,54%
Rata-rata Pertumbuhan (%)	12,51%	6,10%	13,44%	67,95%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).



Grafik 3.3

### Perkembangan Peranan Sumber –sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

Pajak daerah, selama lima tahun terakhir meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 7,57% . Pajak daerah pada tahun 2016 adalah Rp7.571.636.469,03 menjadi Rp9.712.781.443,00 pada tahun 2020. Pajak daerah memberikan kontribusi kedua terkecil dalam struktur Pendapatan Asli Daerah . Rata-rata kontribusi pajak selama tahun 2016–2020 adalah 12,51% . Adapun setiap tahunnya selama periode tersebut berfluktuasi

Melihat trend penerimaan pajak yang meningkat dan juga sumbangan yang masih kecil , diperkirakan pendapatan asli daerah dari komponen ini masih dapat ditingkatkan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah.

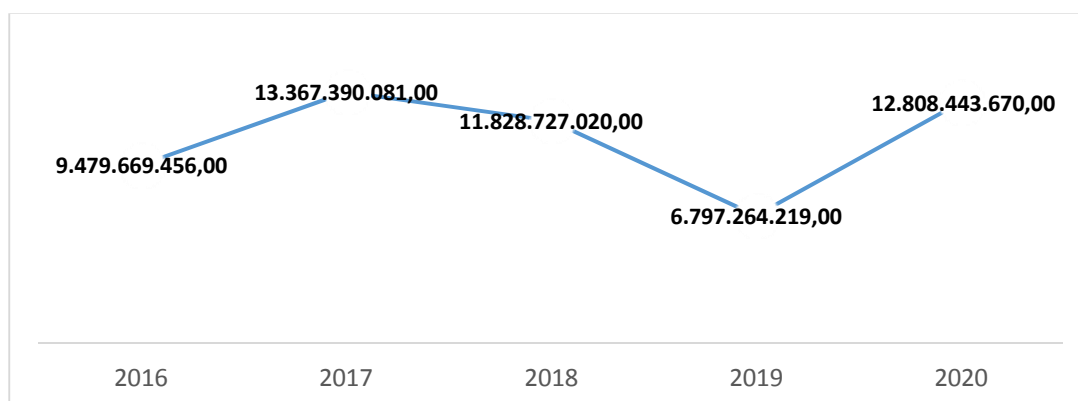
Retribusi Daerah selama tahun 2016–2020, besaran pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah meningkat secara perlahan dengan rata -rata pertumbuhan per tahun 2,66% . Kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD selama tahun 2016–2020 naik dengan perlahan, dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 6,10% . Kontribusi pada tahun 2016,2019 dan 2020 berada diatas rata-rata tahunan yakni 6,47% , 6,98% dan 6,15 % , sedangkan kontribusi pada tahun 2017 dan 2018 berada di bawah rata-rata tahunan yaitu 4,83% pada 2017, 6,09% pada tahun 2018.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, selama tahun 2016 –2020 secara umum meningkat namun pada tahun 2019 berada pada titik terendah. Rata-rata pertumbuhan pertahun pendapatan yang



bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama periode 2016–2020 adalah 21,73%.

Meskipun secara riil pendapatan dari komponen ini meningkat, namun trend yang ditunjukkan flutuatif sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

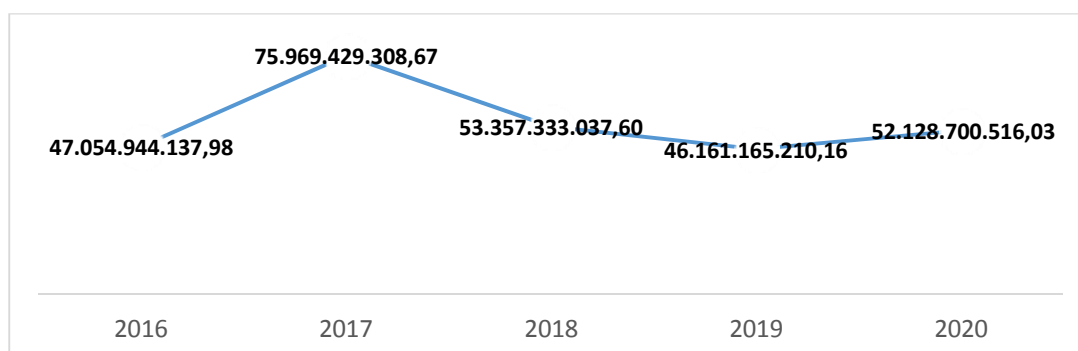


Grafik 3.4

Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

Sumber PAD yang berupa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selama tahun 2016–2020 mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp75.969.429.308,67 dan berada di titik terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp46.161.165.210,16 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah 7,78% . Untuk lebih lanjut tersaji pada grafik di bawah.



Grafik 3.5

Perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

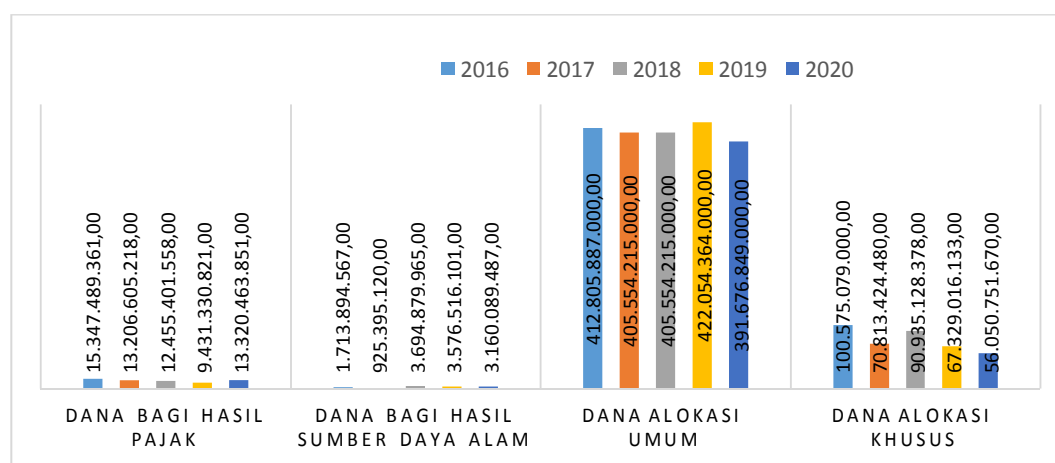


### 3.1.1.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Daerah berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Setiap jenis dana perimbangan mempunyai peran masing – masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antar a pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah ( *fiscal equalization* ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.

Selama tahun 2016 –2020, Dana Perimbangan rata –rata pertahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar –1,04% . Tahun 2016 sebesar Rp549.915.943.860 menjadi Rp525.379.250.738 di Tahun 2020. Dana bagi hasil pajak menurun dari Rp15.347.489.361 di Tahun 2016 menjadi Rp13.320.463.851 di Tahun 2020 dengan rata–rata pertumbuhan –0,67% . Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meningkat dari Rp1.713.894.567 di Tahun 2016 menjadi Rp3.160.089.487 di Tahun 2020 dengan pertumbuhan rata –rata 59,61% .

Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp412.805.887.000 di Tahun 2016 menjadi Rp391.676.849.000 dengan rata –rata pertumbuhan – 1,22% . Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp100.575.079.000 di Tahun 2016 menjadi Rp56.050.751.670 di Tahun 2020, mengalami rata –rata pertumbuhan sebesar –10.97%.



Grafik 3.6

Perkembangan Dana Perimbangan Kota Sibolga Tahun 2016 –2020  
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah)

### 3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin.

Komponen Belanja daerah di Kota Sibolga meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (kelurahan) Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Untuk Belanja Tidak Langsung mengalami rata –rata pertumbuhan sebesar 1,62% . Dalam waktu 5 tahun kondisi tersebut fluktuatif, akan tetapi secara umum apabila dilihat dari Tahun 2016



ke Tahun 2020 mengalami kenaikan , walaupun di Tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Untuk Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 8,63% atau bertumbuh -8,63% . Selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini.

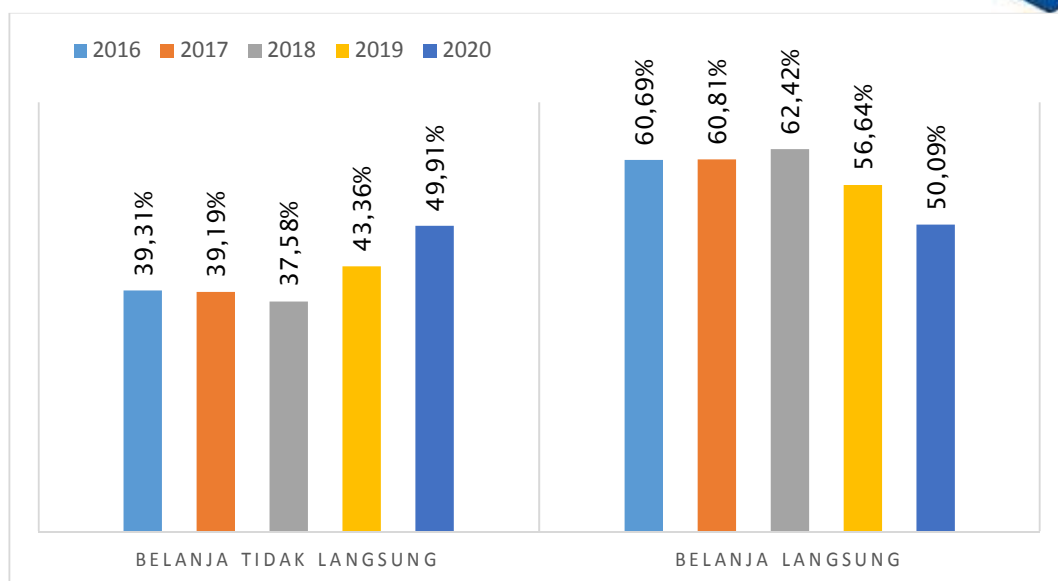


**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah**  
**Kota Sibolga Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>271.105.360.089,00</b>	<b>234.206.770.805,00</b>	<b>239.302.047.475,00</b>	<b>252.007.215.384,00</b>	<b>283.727.059.696,00</b>	<b>1,62</b>
	Belanja Pegawai	255.309.080.574,00	220.325.361.185,00	221.674.255.840,00	230.812.153.978,00	222.752.236.807,00	-3,12
	Belanja Bunga						
	Belanja Subsidi						
	Belanja Hibah	5.867.000.000,00	4.022.400.000,00	6.307.695.000,00	5.232.540.764,00	20.010.660.004,0	72,69
	Belanja Bantuan Sosial	9.251.162.200,00	9.559.797.000,00	10.663.203.365,00	15.343.636.000,00	17.751.667.000,0	18,62
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai politik	349.954.815,00	299.212.620,00	481.519.635,00	180.254.642,00	141.012.566,0	-9,48
	Belanja Tidak Terduga	328.162.500,00		175.373.635,00	438.630.000,00	23.071.483.319,0	
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>418.572.832.857,79</b>	<b>363.480.761.266,24</b>	<b>397.436.929.041,61</b>	<b>329.256.900.662,64</b>	<b>284.697.287.240,09</b>	<b>-8,63</b>
	Belanja Pegawai	55.436.940.231,00	54.293.521.316,00	60.966.939.892,00	22.312.460.299,00	22.420.366.601,00	-13,17
	Belanja Barang dan Jasa	177.753.748.714,18	184.362.865.013,72	194.002.165.787,61	225.375.181.204,64	176.235.683.263,09	0,83
	Belanja Modal	185.382.143.912,61	124.824.374.936,52	142.467.823.362,00	81.569.259.159,00	86.041.237.376,00	-13,95
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>689.678.192.946,79</b>	<b>597.687.532.071,24</b>	<b>636.738.976.516,61</b>	<b>581.264.116.046,64</b>	<b>568.424.346.936,09</b>	<b>-4,43</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).





Grafik 3.7

Struktur Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020  
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

Struktur Belanja Tidak langsung didominasi oleh Belanja Pegawai dimana dari Tahun 2016 –2020 Belanja Tidak Langsung masih di bawah 50%. Pada Tahun 2016 sebesar 39,31% dan pada tahun 2020 sebesar 49,91%. Belanja Langsung pada semua komponen mengalami penurunan dari Tahun 2016 ke Tahun 2020.

Melihat kondisi di atas tersebut, untuk tahun yang akan datang harus berusaha menekan Belanja Tidak Langsung dan berusaha menaikkan proporsi belanja langsung guna meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Potensi dan tantangan perkembangan ke depan Kota Sibolga ditinjau dari perspektif Regional adalah sebagai berikut:

1. Kota Sibolga merupakan jalur penting di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan adanya Pelindo I sehingga memegang peranan dalam distribusi barang dan jasa, diharapkan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan kawasan Pantai Barat Lainnya.
2. Apabila dilihat dari indikator non ekonomi, misalnya Angka Harapan Hidup Kota Sibolga dibandingkan dengan Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan Angka Melek Hurufnya lebih baik daripada Kabupaten/Kota sekitarnya, sehingga nantinya diharapkan dapat sebagai energi untuk menaikkan pendapatan yang dampaknya dapat menekan angka kemiskinan.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap neraca daerah. Analisis neraca daerah dimaksud, terdiri dari rasio *liquiditas*, *solvabilitas* dan rasio aktivitas. Neraca Daerah merupakan gambaran posisi akhir keadaan keuangan suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu periode Akuntansi, yang di dalamnya menyajikan Aktiva Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aktiva Tetap dan Aset Lainnya serta menyajikan kewajiban dan ekuitas dana investasi.

Dalam penyajian Neraca Pemerintah Kota Sibolga beberapa perkiraan tahun terakhir terjadi peningkatan, diantaranya pos Aset Lancar mengalami rata-rata peningkatan rata-rata pertahun sebesar 14,59%. Pada Tahun 2016 sebesar Rp45.876.471.212,93 menjadi Rp115.595.079.377,68 di Tahun 2020, Investasi Jangka Panjang rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9,38%, pada Tahun 2016 sebesar Rp30.882.832.429,10 menjadi sebesar Rp50.282.541.952,95 pada Tahun 2020. Pos Aset Tetap terjadi penurunan rata-rata pertahun sebesar -0,71% walau jumlah secara riil, pada Tahun 2016 sebesar Rp1.339.577.469.638,56 menjadi Rp1.368.944.068.423,15 pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan berkurang. Pos Aset Lainnya mengalami



rata-rata peningkatan sebesar 53,29% , dari Tahun 2016 sebesar Rp48.801.679.840,00 menjadi Rp114.150.550.513,18 pada Tahun 2020.

Sementara itu peningkatan jumlah pos Kewajiban J angka Pendek setiap tahunnya besarnya berfluktuasi bergantung pada besaran jumlah utang jangka pendek. Pada tahun 2016 sebesar Rp6.958.155.780,32 menjadi Rp5.823.552.713,00 atau rata -rata bertumbuh sebesar -17,23% .

Pada Pos *equitas* , *Equitas* Dana Lancar mengalami peningkatan besaran jumlah dari Tahun 2016 sebesar Rp1.458.180.297.340,27 menjadi Rp1.643.148.687.553,96 pada Tahun 2020, atau mengalami rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 1,62% . *Equitas* Dana Investasi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,68% dengan besaran Rp1.465.138.453.120,59 pada Tahun 2016 menjadi Rp1.648.972.240.266,96 pada Tahun 2020.

Perkembangan neraca Pemerintah Kota Sibolga dari Tahun 2016–2020 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.7**  
**Neraca Kota Sibolga**  
**Per 31 Desember Tahun 2016–2020 (Audited)**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>45.876.471.212,93</b>	<b>65.278.864.334,63</b>	<b>46.073.611.900,13</b>	<b>67.375.759.383,95</b>	<b>115.595.079.377,68</b>	<b>14,59%</b>
1.1.1	Kas di Kas Daerah	16.482.801.378,60	26.028.551.035,77	1.151.639.045,37	27.409.401.779,96	62.206.504.346,99	457,93%
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	400.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	34.051.000,00	0,00%
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	178.374.601,00	53.596.098,00	13.203.182,00	61.500,00	0,00	-26,34%
1.1.4	Kas Di BLUD	5.463.762.174,58	7.757.605.257,86	12.609.957.302,25	15.221.525.321,61	24.773.931.612,52	0,00%
1.1.5	Kas Di FKTP	853.941.858,00	392.298.246,00	586.501.400,00	473.147.940,00	272.530.265,00	0,00%
1.1.6	Kas di Bendahara BOS	26.250.960,00	30.413.873,00	41.063.546,00	874.136.538,00	76.845.523,00	0,00%
1.1.7	Kas lainnya	0,00	0,00	0,00	51.867.464,00	84.076.332,00	0,00%
1.1.8	Setara KAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.10	Piutang Pendapatan	19.575.609.523,00	24.715.232.579,76	28.332.915.732,25	20.675.156.001,67	24.630.139.156,43	23,31%
1.1.11	Piutang Lainnya		2.345.931.186,32	2.264.403.304,24	2.228.443.732,56	2.387.135.163,04	0,00%
1.1.12	Penyisihan Piutang	(6.198.724.755,14)	(6.123.854.528,60)	(7.500.281.015,52)	(7.139.800.836,51)	(7.534.367.562,32)	0,00%
1.1.13	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	20.625.000,00	233.333.333,00	364.104.950,00	0,00%
1.1.14	Persediaan	9.494.055.472,89	10.079.090.586,52	8.553.584.403,54	7.345.976.609,66	8.300.128.591,02	1,59%
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>						
1.2.1.1	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.2	Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.4	Dana Bergulir	1.904.000.000,00	1.904.000.000,00	1.904.000.000,00	1.477.929.038,57	1.477.929.038,57	33,34%



NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.6	Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0,00	(1.904.000.000,00)	(1.904.000.000,00)	(1.477.929.038,57)	(1.477.929.038,57)	0,00%
1.2.2	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>						0,00%
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28.978.832.429,10	35.396.490.937,00	40.642.370.394,05	40.448.292.918,05	50.282.541.952,95	10,09%
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>						0,00%
1.3.1	Tanah	421.889.772.253,00	397.367.017.753,00	565.947.674.832,00	551.429.835.832,00	542.553.062.872,00	9,02%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	298.399.688.269,28	291.131.033.993,84	279.664.272.231,79	303.305.943.576,79	329.311.804.225,79	5,96%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	489.348.767.920,00	474.739.714.962,00	482.308.407.939,00	515.542.784.483,00	546.274.744.012,00	3,72%
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	426.839.909.208,00	486.207.933.208,00	536.712.051.375,00	544.892.232.978,00	535.238.607.338,00	6,83%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	30.583.467.756,00	18.138.535.194,00	17.344.125.184,55	15.530.259.929,62	17.445.436.198,32	-5,52%
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.372.990.880,00	4.050.396.820,00	4.182.906.170,00	1.638.009.184,00	6.067.020.519,00	110,85%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(362.857.126.647,72)	(453.297.695.229,81)	(484.360.362.016,00)	(551.807.090.647,00)	(607.946.606.741,96)	114,25%
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						0,00%
1.4.1	Dana Cadangan						0,00%
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						0,00%
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	664.447.775,66	13.076.959.748,80	0,00%
1.5.3	Aset Tak Berwujud	1.080.013.466,00	1.241.884.466,00	1.819.051.400,00	1.928.606.036,00	2.086.547.636,00	9,84%
1.5.4	Aset Lain-lain	47.616.666.374,00	41.241.235.716,00	95.532.068.443,36	82.668.983.106,94	98.987.043.128,38	52,89%
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>1.465.138.453.120,59</b>	<b>1.361.600.412.154,66</b>	<b>1.585.971.177.853,88</b>	<b>1.573.618.064.557,01</b>	<b>1.648.972.240.266,96</b>	<b>-0,32%</b>



NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>6.958.155.780,32</b>	<b>6.250.036.448,75</b>	<b>5.300.832.260,00</b>	<b>3.915.282.720,00</b>	<b>5.823.552.713,00</b>	<b>-17,23%</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	186.975.141,00	53.596.098,00	13.203.182,00	32.767.787,00	16.621.566,00	0,00%
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	98.684.727,00	128.927.378,33	95.463.832,00	132.368.441,00	168.954.063,00	0,00%
2.1.5	Utang Beban	2.239.648.735,00	3.664.148.489,42	1.309.262.605,00	1.278.062.501,00	2.872.543.040,00	5,41%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.432.847.177,32	2.403.364.483,00	3.882.902.641,00	2.472.083.991,00	2.765.434.044,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>						
3.1	EKUITAS	1.458.180.297.340,27	1.355.350.375.705,91	1.580.670.345.593,88	1.569.702.781.837,01	1.643.148.687.553,96	1,62%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.465.138.453.120,59</b>	<b>1.361.600.412.154,66</b>	<b>1.585.971.177.853,88</b>	<b>1.573.618.064.557,01</b>	<b>1.648.972.240.266,96</b>	<b>1,68%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Kota Sibolga (data diolah).



Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Nilai ekuitas Pemerintah Kota Sibolga dari Tahun 2016–2020 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 1,62% dengan saldo pada tahun 2016 sebesar Rp1.458.180.297.340,27 dan pada tahun 2020 menjadi Rp1.643.148.687.553,96. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas pada Tahun 2016 sebesar Rp1.465.138.453.120,59 meningkat menjadi Rp1.648.972.240.266,96 pada Tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,68%.

Sebagai catatan dalam penyajian Neraca Keuangan di Tahun 2019 pada pos Kas di tangan Bendahara Bos sebesar Rp874.136.538,00 terjadi karena transfer dilakukan per 31 Desember 2019 sehingga tidak dapat tersalurkan pada tahun berkenaan. Penyaluran dana dilaksanakan Tahun 2020.

### 3.1.3. Rasio Keuangan

Berdasarkan Neraca Daerah Tahun 2016–2020, untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan analisis rasio *solvabilitas* untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

#### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk Neraca Keuangan Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *quick ratio*. Rasio lancar adalah Aset Lancar dibagi dengan Kewajiban J angka Pendek, sedang *quick ratio* adalah Aset Lancar dikurangi Persediaan dibagi dengan Kewajiban J angka Pendek. Data Rasio Likuiditas selama 5 (lima) tahun terakhir Tahun 2016–2020 sebagaimana tabel berikut.



**Tabel 3.8**  
**Rasio Likuiditas**  
**Kota Sibolga Tahun 2016–2020**

Rasio Likuiditas	Rumus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Rasio Lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	$\frac{45.876.471.212,93}{6.958.155.780,32}$	$\frac{65.278.864.334,63}{6.250.036.448,75}$	$\frac{46.073.611.900,13}{5.300.832.260,00}$	$\frac{67.375.759.383,95}{3.915.282.720,00}$	$\frac{115.595.079.377,68}{5.823.552.713,00}$
		6,5931940	10,4445574	8,6917695	17,2084021	19,8495807
Rasio Quick	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	$\frac{36.382.415.740,04}{6.958.155.780,32}$	$\frac{55.199.773.748,11}{6.250.036.448,75}$	$\frac{37.520.027.496,59}{5.300.832.260,00}$	$\frac{60.029.782.774,29}{3.915.282.720,00}$	$\frac{107.294.950.786,66}{5.823.552.713,00}$
		5,2287441	8,8319123	7,0781390	15,3321706	18,4243118
Rasio Total Hutang Terhadap Aset	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	$\frac{6.958.155.780,32}{1.465.138.453.120,59}$	$\frac{6.250.036.448,75}{1.361.600.412.154,66}$	$\frac{5.300.832.260,00}{1.585.971.177.853,88}$	$\frac{3.915.282.720,00}{1.573.618.064.557,01}$	$\frac{5.823.552.713,00}{1.648.972.240.266,96}$
		0,0047491	0,0045902	0,0033423	0,0024881	0,0035316
Rasio Total Hutang Terhadap Modal	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	$\frac{6.958.155.780,32}{1.465.138.453.120,59}$	$\frac{6.250.036.448,75}{1.361.600.412.154,66}$	$\frac{5.300.832.260,00}{1.585.971.177.853,88}$	$\frac{3.915.282.720,00}{1.573.618.064.557,01}$	$\frac{5.823.552.713,00}{1.648.972.240.266,96}$
		0,0047491	0,0045902	0,0033423	0,0024881	0,0035316

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Kota Sibolga (data diolah) .





Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Sibolga dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2016 sebesar 6,5931940. Tahun 2017 sebesar 10,4445574, Tahun 2018 sebesar 8,6917695 dan pada Tahun 2019 sebesar 17,2084021. Tahun 2020 sebesar 19,8495807. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin meningkat.

*Quick ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 (*Quick ratio* <1). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* Neraca Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2016 sebesar 5,2287441 Tahun 2017 sebesar 8,8319123. Tahun 2018 sebesar 7,0781390 dan pada Tahun 2019 sebesar 15,3321706 dan terakhir pada Tahun 2020. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Sibolga setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

#### **b. Rasio Solvabilitas**

*Ratio solvabilitas* digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban –kewajiban jangka panjang. Untuk neraca keuangan daerah, *ratio solvabilitas* yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset Tahun 2016 sebesar 0,0047491, Tahun 2017 sebesar 0,0045902, Tahun 2018 sebesar 0,0033423, Tahun 2019 sebesar 0,0024881 dan terakhir



tahun 2020 sebesar 0,0035316. Dari rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sibolga selama Tahun 2016–2020 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kota Sibolga melakukan pinjaman ke kreditor dan kemampuan membayar tersebut cenderung meningkat.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio Tahun 2016 sebesar 0,0047491, Tahun 2017 sebesar 0,0045902, Tahun 2018 sebesar 0,0033423 dan Tahun 2019 sebesar 0,0024881 dan terakhir Tahun 2020 sebesar 0,0035316. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Sibolga merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada paragraf berikutnya .

Dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga secara umum telah dicapai hasil perbaikan tata kelola yang ditunjukkan dengan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari kondisi Tidak Memberikan Pendapat di tahun 2015–2016 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2017. Upaya perbaikan terus dilakukan sehingga pada tahun 2018–2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil tersebut diharapkan dapat dipertahankan di tahun–tahun berikutnya sehingga opini WTP dapat tetap dipertahankan.



### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2016-2020, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 37,31% sedangkan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 62,69%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil porsinya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan sudah berorientasi kepada masyarakat terlebih kepada sektor pendidikan dan kesehatan.



Tabel 3.9  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020

Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
2016	255.309.080.574,00	690.228.238.131,79	36,99%
2017	220.325.361.185,00	604.178.465.274,24	36,47%
2018	221.674.255.840,00	641.703.838.644,61	34,54%
2019	230.812.153.978,00	581.083.861.404,64	39,72%
2020	222.752.236.807,00	573.655.871.460,09	38,83%
Rata-rata			37,31%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah).

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menaik, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut semakin menurun hingga tahun 2020. Pada tahun 2019, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 39,72% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya menurun pada tahun 2020 menjadi hanya sebesar 38,83%, Proporsi di tahun 2018 menjadi proporsi paling rendah selama 5 tahun terakhir. Ini bukan merupakan indikasi adanya peningkatan belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, namun lebih kepada penurunan pengeluaran pada tahun 2020, sehingga meskipun belanja pemenuhan aparatur mengalami penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan apratur terhadap total pengeluaran terlihat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.



### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pembiayaan Kota Sibolga Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.10

## Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 –2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	623.453.846.568,01	615.864.227.562,69	622.367.464.687,60	610.446.000.905,16	617.321.840.304,03
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah dan Transfer	689.678.192.946,79	597.687.532.071,24	636.738.976.516,61	581.264.116.046,64	568.424.346.936,09
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	900.000.000,00	6.790.145.823,00	5.446.381.763,00	0,00	5.372.537.090,00
	Defisit Riil	(67.124.346.378,78)	11.386.549.668,45	(19.817.893.592,01)	29.181.884.858,52	43.524.956.277,94

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (data diolah)



### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan

Sektor Pendapatan Daerah Kota Sibolga meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Tahun 2021 –2026 diproyeksi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mengingat beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang minus 1,36 dan masih adanya fokus penanganan Pandemi Covid –19. Mengingat kondisi tersebut, proyeksi Pendapatan dan Belanja diperkirakan naik sebesar 5–10%.

Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya pandemi Covid –19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintan pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Seperangkat regulasi tersebut merumuskan pentingnya perubahan kebijakan anggaran dari anggaran Pemerintah yang



tertuang dalam APBN, sampai dengan perubahan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD. Perubahan kebijakan anggaran tersebut dipayungi dengan aturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid –19. Perppu tersebut memberikan payung hukum tertinggi dalam kondisi darurat agar Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, melakukan langkah-langkah cepat dalam perubahan anggaran. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan:

1. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk melakukan perubahan alokasi antar program;
3. perubahan alokasi; dan
4. penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid –19, memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan Inpres tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan





pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk:

a. Penanganan Kesehatan, antara lain:

1. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, *ventilator*, dan alat uji deteksi Covid-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
3. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien Covid -19;
4. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
5. Penyemprotan disinfektan;
6. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
8. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid -19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
9. Penanganan jenazah korban positif Covid -19;
10. Penanganan kesehatan lainnya.



- b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:
  1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying* ;
  2. Pemberian insentif berupa:
    - a) Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
    - b) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
    - c) Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
  3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
  4. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
  
- c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemda secara memadai kepada antara lain:
  1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;
  2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
  3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian Hibah/Bansos dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemda berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos. Tata cara pemberian Hibah/Bansos dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur



dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, yang telah diperbarui dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka pemerintah Kota Sibolga melakukan proyeksi Pendapatan, dan juga dengan memperkirakan beberapa sumber yang belum diperhitungkan, antara lain:

1. Dana APBN
2. Dana Alokasi Khusus;
3. Bantuan Keuangan Umum dari Propinsi Sumatera Utara;
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
5. Dana Insentif Daerah
6. Bentuk –Bentuk Lain yang Merupakan Hak Daerah dan
7. Dana BOS
8. Dana Pinjaman untuk Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Sibolga, dilakukan langkah –langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah .
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali ( *annual -review* ) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.



### 3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda –agenda pembangunan yang secara umum dapat dirincikan melalui:

- a. Mendanai belanja wajib dan mengikat;
- b. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kota Sibolga dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- c. Mendanai hibah bansos dan bantuan keuangan yang diberikan jika belanja wajib dan mengikat dan belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sudah tercukupi.

Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi –asumsi sebagai berikut:

- a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai PPPK;
- b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Sibolga tahun 2021 –2026;
- c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga ( *inflasi* ) dengan kebutuhan belanja.

### 3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kota Sibolga diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.



#### 3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi sesuai prioritas selama tahun 2021–2026. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sibolga selama 5 (lima) tahun ke depan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana Tabel Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2021–2026. Dari tabel tersebut dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Sibolga untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2021 –2026, yaitu:



Tabel 3.11  
Perkiraan Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>590.998.535.142,00</b>	<b>614.549.880.674,85</b>	<b>649.179.770.039,98</b>	<b>682.187.329.003,13</b>	<b>716.552.509.807,16</b>	<b>752.754.576.683,39</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>89.181.856.201,00</b>	<b>88.272.605.286,70</b>	<b>97.218.868.382,33</b>	<b>103.258.619.762,49</b>	<b>109.307.602.604,38</b>	<b>115.777.661.620,38</b>
1.1.1	Pajak Daerah	10.783.919.148,00	11.323.115.105,40	11.889.270.860,67	12.483.734.403,70	13.107.921.123,89	13.763.317.180,08
1.1.2	Retribusi Daerah	6.442.741.410,00	14.145.910.905,50	17.796.583.150,78	18.344.526.508,31	18.687.279.533,73	19.216.732.710,42
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.649.887.301,00	8.504.876.031,10	9.385.363.634,21	10.348.899.997,63	11.403.789.997,39	12.559.168.997,13
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	64.305.308.342,00	54.298.703.244,70	58.147.650.736,67	62.081.458.852,84	66.108.611.949,37	70.238.442.732,75
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>489.211.928.943,00</b>	<b>513.672.525.390,15</b>	<b>539.356.151.659,66</b>	<b>566.323.959.242,64</b>	<b>594.640.157.204,77</b>	<b>624.372.165.065,01</b>
1.2.1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	475.574.647.000,00	499.353.379.350,00	524.321.048.317,50	550.537.100.733,38	578.063.955.770,04	606.967.153.558,55
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.637.281.943,00	14.319.146.040,15	15.035.103.342,16	15.786.858.509,27	16.576.201.434,73	17.405.011.506,47
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>12.604.749.998,00</b>	<b>12.604.749.998,00</b>	<b>12.604.749.998,00</b>	<b>12.604.749.998,00</b>	<b>12.604.749.998,00</b>	<b>12.604.749.998,00</b>
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	12.604.749.998,00	12.604.749.998,00	12.604.749.998,00	12.604.749.998,00	12.604.749.998,00	12.604.749.998,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>590.998.535.142,00</b>	<b>616.549.880.674,85</b>	<b>651.179.770.039,98</b>	<b>684.187.329.003,12</b>	<b>718.552.509.807,16</b>	<b>754.754.576.683,39</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>497.818.924.814,83</b>	<b>533.690.589.449,92</b>	<b>564.445.014.253,81</b>	<b>593.383.335.427,64</b>	<b>623.475.816.552,90</b>	<b>655.191.548.766,42</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	276.513.654.315,03	290.339.337.030,78	304.856.303.882,32	320.099.119.076,44	336.104.075.030,26	352.909.278.781,77
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	211.159.645.499,80	223.410.571.169,14	230.889.800.176,99	228.606.079.398,58	243.654.325.612,99	259.496.213.044,10
2.1.3	Belanja Hibah	4.554.800.000,00	4.782.540.000,00	5.021.667.000,00	5.272.750.350,00	5.536.387.867,50	5.813.207.260,88
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.590.825.000,00	5.870.366.250,00	6.163.884.562,50	6.472.078.790,63	6.795.682.730,16	7.135.466.866,66
2.1.5	Belanja Bunga	-	9.287.775.000,00	17.513.358.632,00	32.933.307.812,00	31.385.345.312,00	29.837.382.813,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>73.818.372.595,17</b>	<b>77.509.291.224,93</b>	<b>81.384.755.786,17</b>	<b>85.453.993.575,48</b>	<b>89.726.693.254,26</b>	<b>94.213.027.916,97</b>



No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	28.671.422.324,20	30.104.993.440,41	31.610.243.112,43	33.190.755.268,05	34.850.293.031,45	36.592.807.683,03
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	20.834.188.277,53	21.875.897.691,41	22.969.692.575,98	24.118.177.204,78	25.324.086.065,01	26.590.290.368,27
2.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.326.340.493,44	22.392.657.518,11	23.512.290.394,02	24.687.904.913,72	25.922.300.159,40	27.218.415.167,37
2.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.986.421.500,00	3.135.742.575,00	3.292.529.703,75	3.457.156.188,94	3.630.013.998,38	3.811.514.698,30
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>19.361.237.732,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>-</b>	<b>- 2.000.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
3.3	Pembiayaan Netto						
	SilPa Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sibolga. (Data diolah)



Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah di atas berasal dari pos berikut ini

Tabel 3.12  
Perkiraan Rincian Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>89.181.856.201,00</b>	<b>88.272.605.286,70</b>	<b>97.218.868.382,33</b>	<b>103.258.619.762,49</b>	<b>109.307.602.604,38</b>	<b>115.777.661.620,38</b>
<b>4.1.1</b>	<b>I. PAJAK DAERAH</b>	<b>10.783.919.148,00</b>	<b>11.323.115.105,40</b>	<b>11.889.270.860,67</b>	<b>12.483.734.403,70</b>	<b>13.107.921.123,89</b>	<b>13.763.317.180,08</b>
1	Pajak Hotel	414.840.000,00	435.582.000,00	457.361.100,00	480.229.155,00	504.240.612,75	529.452.643,39
2	Pajak Restoran	1.381.360.000,00	1.450.428.000,00	1.522.949.400,00	1.599.096.870,00	1.679.051.713,50	1.763.004.299,18
3	Pajak Hiburan	102.140.000,00	107.247.000,00	112.609.350,00	118.239.817,50	124.151.808,38	130.359.398,79
4	Pajak Reklame	388.360.000,00	407.778.000,00	428.166.900,00	449.575.245,00	472.054.007,25	495.656.707,61
5	Pajak Penerangan Jalan	5.133.218.748,00	5.389.879.685,40	5.659.373.669,67	5.942.342.353,15	6.239.459.470,81	6.551.432.444,35
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Parkir	52.308.000,00	54.923.400,00	57.669.570,00	60.553.048,50	63.580.700,93	66.759.735,97
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-
10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	2.311.692.400,00	2.427.277.020,00	2.548.640.871,00	2.676.072.914,55	2.809.876.560,28	2.950.370.388,29
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00	1.276.281.562,50
<b>4.1.2</b>	<b>RETRIBUSI</b>	<b>6.442.741.410,00</b>	<b>14.145.910.905,50</b>	<b>17.796.583.150,78</b>	<b>18.344.526.508,31</b>	<b>18.687.279.533,73</b>	<b>19.216.732.710,42</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>A. RETRIBUSI JASA UMUM:</b>	<b>4.023.574.500,00</b>	<b>11.073.646.450,00</b>	<b>14.566.066.272,50</b>	<b>14.900.344.586,13</b>	<b>15.073.749.315,43</b>	<b>15.427.886.781,20</b>
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	393.679.000,00	413.362.950,00	434.031.097,50	455.732.652,38	478.519.284,99	502.445.249,24
4.1.2.02.01	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.533.400.000,00	1.610.070.000,00	1.687.811.000,00	1.766.676.550,00	1.846.722.877,50	1.928.009.021,38
	Dinas LHKP (PDAM)	1.105.000.000,00	1.160.250.000,00	1.215.500.000,00	1.270.750.000,00	1.326.000.000,00	1.381.250.000,00
	Dinas LHKP (Pengalihan dari Pasar)	428.400.000,00	449.820.000,00	472.311.000,00	495.926.550,00	520.722.877,50	546.759.021,38





Kode Rekening	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Retribusi Pelayanan Pasar Ikan - tahun 2023 ( Ex. BUDI JAYA ) lantai I	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00	2.079.000.000,00	2.182.950.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar Ikan - tahun 2023 ( Ex. BUDI JAYA ) lantai II	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	1.417.500.000,00	1.488.375.000,00
4.1.2.04.01	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	382.500.000,00	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	1.215.506.250,00
4.1.2.05.01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran / Plat	388.725.500,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
4.1.2.05.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los -	224.870.000,00	236.113.500,00	247.919.175,00	260.315.133,75	273.330.890,44	286.997.434,96
4.1.2.05.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios / plat	1.058.400.000,00	4.270.000.000,00	4.270.000.000,00	4.270.000.000,00	4.270.000.000,00	4.270.000.000,00
4.1.2.07.02	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (SATPOL PP)-	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.586.075,00	15.315.378,75
4.1.2.11.01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Perindag) -	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00	34.728.750,00	36.465.187,50	38.288.446,88
<b>4.1.2.02</b>	<b>B. RETRIBUSI JASA USAHA:</b>	<b>2.289.166.910,00</b>	<b>2.935.764.455,50</b>	<b>3.087.191.878,28</b>	<b>3.293.690.672,19</b>	<b>3.455.514.405,80</b>	<b>3.622.929.326,09</b>
4.1.2.09.01	Retribusi Jasa Penyedotan Kakus	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00	27.783.000,00	29.172.150,00	30.630.757,50
4.1.2.10.01	Dinas PKLH (Rusunawa) Blok A dan Blok B	206.100.000,00	206.100.000,00	206.100.000,00	206.100.000,00	206.100.000,00	206.100.000,00
4.1.2.14	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	199.357.410,00	806.985.280,50	864.994.544,53	973.404.271,75	1.032.234.485,34	1.091.506.209,61
4.1.2.14.01	Sekretariat Daerah -	67.557.410,00	70.935.280,50	74.482.044,53	78.206.146,75	82.116.454,09	86.222.276,79
	Dinas Pendidikan (RumDis) - plat	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
	Dinas Kelautan (RumDis) - plat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Dinas Kesehatan (RumDis)- plat	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum ( tanah pemko) - plat 50 juta	0	600.000.000,00	650.000.000,00	750.000.000,00	800.000.000,00	850.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat Berat (LHKP) -	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.516.875,00	42.542.718,75	44.669.854,69
	Retribusi Pemakaian Alat Berat (PU)-	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,50	63.814.078,13
4.1.2.17.03	Terminal	249.654.000,00	262.136.700,00	275.243.535,00	289.005.711,75	303.455.997,34	318.628.797,20



Kode Rekening	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.1.2.17.02	Dinas Perindag (Kios Jl. Rajawali 8 Unit)- plat	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
4.1.2.18.01	Retribusi Tempat Khusus Parkir – Pelayanan Parkir di Pasar (Perindag)	240.902.000,00	252.947.100,00	265.594.455,00	278.874.177,75	292.817.886,64	307.458.780,97
	Retribusi Tempat Khusus Parkir – Pelataran Parkir WI (Dishub) – plat	101.516.000,00	51.516.000,00	51.516.000,00	51.516.000,00	51.516.000,00	51.516.000,00
4.1.2.20.01	Retribusi Rumah Potong Hewan –	73.800.000,00	77.490.000,00	81.364.500,00	85.432.725,00	89.704.361,25	94.189.579,31
4.1.2.22.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	173.220.000,00	181.881.000,00	190.975.050,00	200.523.802,50	210.549.992,63	221.077.492,26
4.1.2.23.01	Retribusi Pelayanan Dermaga Penyeberangan	1.017.817.500,00	1.068.708.375,00	1.122.143.793,75	1.178.250.983,44	1.237.163.532,61	1.299.021.709,24
<b>4.1.2.03</b>	<b>C. RETRIBUSI JASA PERIZINAN:</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>136.500.000,00</b>	<b>143.325.000,00</b>	<b>150.491.250,00</b>	<b>158.015.812,50</b>	<b>165.916.603,13</b>
4.1.2.25.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) DINAS PU –	90.000.000,00	94.500.000,00	99.225.000,00	104.186.250,00	109.395.562,50	114.865.340,63
4.1.2.27.01	Retribusi izin Trayek Bus/Mopen –	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	48.620.250,00	51.051.262,50
<b>4.1.3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>7.649.887.301,00</b>	<b>8.504.876.031,10</b>	<b>9.385.363.634,21</b>	<b>10.348.899.997,63</b>	<b>11.403.789.997,39</b>	<b>12.559.168.997,13</b>
4.1.3.02	Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD	6.905.765.358,00	7.596.341.893,80	8.355.976.083,18	9.191.573.691,50	10.110.731.060,65	11.121.804.166,71
4.1.3.02.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.905.765.358,00	7.596.341.893,80	8.355.976.083,18	9.191.573.691,50	10.110.731.060,65	11.121.804.166,71
	– Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas pernyataan modal pada PT.BANK SUMUT.	6.905.765.358,00	7.596.341.893,80	8.355.976.083,18	9.191.573.691,50	10.110.731.060,65	11.121.804.166,71
4.1.3.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD	100.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.1.3.03.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
	- Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
<b>4.1.3.04</b>	<b>Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD</b>	<b>644.121.943,00</b>	<b>708.534.137,30</b>	<b>779.387.551,03</b>	<b>857.326.306,13</b>	<b>943.058.936,75</b>	<b>1.037.364.830,42</b>
4.1.3.04.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD ( Bidang Air Minum )	644.121.943,00	708.534.137,30	779.387.551,03	857.326.306,13	943.058.936,75	1.037.364.830,42
	- Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD ( Bidang Air Minum )	644.121.943,00	708.534.137,30	779.387.551,03	857.326.306,13	943.058.936,75	1.037.364.830,42
<b>4.1.4</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>64.305.308.342,00</b>	<b>54.298.703.244,70</b>	<b>58.147.650.736,67</b>	<b>62.081.458.852,84</b>	<b>66.108.611.949,37</b>	<b>70.238.442.732,75</b>
<b>4.1.4.19</b>	<b>Penerimaan dari Jasa Giro</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.210.000.000,00</b>	<b>1.331.000.000,00</b>	<b>1.464.100.000,00</b>	<b>1.610.510.000,00</b>
4.1.4.19.01	Jasa Giro Kas Daerah ( dari Jasa Giro -DPKAD ) - 10%	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.210.000.000,00	1.331.000.000,00	1.464.100.000,00	1.610.510.000,00
<b>4.1.4.26</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara</b>	<b>16.017.899.231,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
4.1.4.26.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	16.017.899.231,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
<b>4.1.4.27</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</b>	<b>14.760.505.859,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
4.1.4.27.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	14.760.505.859,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.1.4.45</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>14.332.500,00</b>	<b>15.049.125,00</b>	<b>15.801.581,25</b>	<b>16.591.660,31</b>
4.1.4.45.01	Pendapatan Denda PBB	13.000.000,00	13.650.000,00	14.332.500,00	15.049.125,00	15.801.581,25	16.591.660,31
	Penjualan ASET / LELANG		-				
<b>4.1.4.53</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	<b>335.478.451,00</b>	<b>335.478.451,00</b>	<b>335.478.451,00</b>	<b>335.478.451,00</b>	<b>335.478.451,00</b>	<b>335.478.451,00</b>
4.1.4.53.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	335.478.451,00	335.478.451,00	335.478.451,00	335.478.451,00	335.478.451,00	335.478.451,00
<b>4.1.4.54</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas</b>	<b>466.924.874,00</b>	<b>466.924.874,00</b>	<b>466.924.874,00</b>	<b>466.924.874,00</b>	<b>466.924.874,00</b>	<b>466.924.874,00</b>
4.1.4.54.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	466.924.874,00	466.924.874,00	466.924.874,00	466.924.874,00	466.924.874,00	466.924.874,00
<b>4.1.4.58</b>	<b>-Pendapatan BLUD</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>43.000.000.000,00</b>	<b>46.000.000.000,00</b>	<b>49.000.000.000,00</b>	<b>52.000.000.000,00</b>
4.1.4.58.01	-Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00	40.000.000.000,00	43.000.000.000,00	46.000.000.000,00	49.000.000.000,00	52.000.000.000,00
<b>4.1.4.61</b>	<b>- Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>	<b>6.711.499.927,00</b>	<b>7.382.649.919,70</b>	<b>8.120.914.911,67</b>	<b>8.933.006.402,84</b>	<b>9.826.307.043,12</b>	<b>10.808.937.747,43</b>
4.1.4.61.01	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.711.499.927,00	7.382.649.919,70	8.120.914.911,67	8.933.006.402,84	9.826.307.043,12	10.808.937.747,43

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sibolga. (Data diolah) .



Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal.



Tabel 3.13  
Perkiraan Pengeluaran Belanja Prioritas Utama Kota Sibolga Tahun 2021 –2026

Rek	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>590.998.535.142,00</b>	<b>616.549.880.674,85</b>	<b>651.179.770.039,98</b>	<b>684.187.329.003,12</b>	<b>718.552.509.807,16</b>	<b>754.754.576.683,39</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>497.818.924.814,83</b>	<b>533.690.589.449,92</b>	<b>564.445.014.253,81</b>	<b>593.383.335.427,64</b>	<b>623.475.816.552,90</b>	<b>655.191.548.766,42</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	276.513.654.315,03	290.339.337.030,78	304.856.303.882,32	320.099.119.076,44	336.104.075.030,26	352.909.278.781,77
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	211.159.645.499,80	223.410.571.169,14	230.889.800.176,99	228.606.079.398,58	243.654.325.612,99	259.496.213.044,10
2.1.3	Belanja Hibah	4.554.800.000,00	4.782.540.000,00	5.021.667.000,00	5.272.750.350,00	5.536.387.867,50	5.813.207.260,88
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.590.825.000,00	5.870.366.250,00	6.163.884.562,50	6.472.078.790,63	6.795.682.730,16	7.135.466.866,66
2.1.5	Belanja Bunga	-	9.287.775.000,00	17.513.358.632,00	32.933.307.812,00	31.385.345.312,00	29.837.382.813,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>73.818.372.595,17</b>	<b>77.509.291.224,93</b>	<b>81.384.755.786,17</b>	<b>85.453.993.575,48</b>	<b>89.726.693.254,26</b>	<b>94.213.027.916,97</b>
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	28.671.422.324,20	30.104.993.440,41	31.610.243.112,43	33.190.755.268,05	34.850.293.031,45	36.592.807.683,03
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	20.834.188.277,53	21.875.897.691,41	22.969.692.575,98	24.118.177.204,78	25.324.086.065,01	26.590.290.368,27
2.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.326.340.493,44	22.392.657.518,11	23.512.290.394,02	24.687.904.913,72	25.922.300.159,40	27.218.415.167,37
2.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.986.421.500,00	3.135.742.575,00	3.292.529.703,75	3.457.156.188,94	3.630.013.998,38	3.811.514.698,30
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>19.361.237.732,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>SURFLUS (DEFISIT)</b>	<b>-</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sibolga. (Data diolah).



Kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJ MD ini. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
2. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Wali Kota (Janji Wali Kota) diluar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
3. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.



Tabel 3.14

## Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	590.998.535.142,00	614.549.880.674,85	649.179.770.039,98	682.187.329.003,13	716.552.509.807,16	752.754.576.683,39
Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>Total Penerimaan</b>	590.998.535.142,00	619.549.880.674,85	654.179.770.039,98	687.187.329.003,13	721.552.509.807,16	757.754.576.683,39
dikurangi:						
Total Belanja dan Pengeluaran yang wajib Mengikat serta Prioritas Utama	590.998.535.142,00	616.549.880.674,85	651.179.770.039,98	684.187.329.003,12	718.552.509.807,16	754.754.576.683,39
Pengeluaran Pembiayaan	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sibolga. (Data diolah).

Tabel di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga secara besaran meningkat perlahan dari tahun ke tahun, namun dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sibolga rendah. Akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, juga menyebabkan adanya tekanan anggaran (*fiscal distress*) pada Kota Sibolga. Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi Covid-19, atau jika

diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2022 pandemi ini akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan kapasitas fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan memungkinkan terjadinya penurunan kapasitas, sehingga diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020, kedepannya membuat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sibolga perlu perhatian, melakukan pengukuran setiap tahunnya dan memperhatikan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).



